

## **UPAYA BNPT DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KEAMANAN DARI KELOMPOK RADIKAL ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA)**

**Septiana Chandra Dewi<sup>1</sup>**  
**Nim. 1202045038**

### ***Abstract***

*Since 2014, radical ideologies and terrorist acts committed by ISIS in various countries around the world have brought serious problems including in Indonesia. Because such behavior can affect the survival of the society and can endanger the integrity of NKRI. Therefore in facing security threats from ISIS, the government has appointed a non-ministerial government agency that is BNPT as a leading sector in carrying out its tasks in counter-terrorism. The purpose of this study is to explain the efforts made by BNPT in dealing with security threats from radical group ISIS. The type of this study is descriptive. In this study the author uses the concept of radicalism and deradicalization; national security; terrorism and counter-terrorism that is used as a reference in analyzing a phenomenon being studied. The BNPT's countermeasures efforts are divided into two, namely internal and external efforts. Internal effort done by preparation, prevention, protection and pursuit. Preparation is manifested in activities such as briefing and training for all citizens. Prevention is manifested in dialogue and socialization activities; community empowerment activities; the implementation of deradicalization and counter-radicalization programs; the implementation of counter-ideology and counter-narration programs. Protection is manifested in coordination and cooperation with stakeholders; socialization of security systems. Pursuit is manifested by action; preparedness and law enforcement. While, external effort done by international cooperation with other countries through bilateral, regional and multilateral.*

***Keywords:*** *ISIS, BNPT, Internal Effort, External Effort*

### **Pendahuluan**

Setelah al-Qaeda ditetapkan sebagai organisasi terorisme internasional karena keterlibatannya dalam berbagai aksi kejahatan. Kini tepatnya pada tahun 2014, muncul kembali ancaman keamanan global dari kelompok yang dikenal dengan nama *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). ISIS awalnya merupakan bagian dari kelompok cabang al-Qaeda di Irak. Tetapi karena terdapat perbedaan misi dan sering terjadi perselisihan menyebabkan ISIS mengambil langkah untuk memisahkan diri. ISIS kemudian mendeklarasikan diri sebagai sebuah kelompok baru yang berbeda dengan al-Qaeda (Fernando P.M. Tambunan. Universitas Indonesia). Perbedaan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: [septiana.dewi@yahoo.com](mailto:septiana.dewi@yahoo.com).

mendasar antara ISIS dan al-Qaeda diantaranya: ISIS membedakan kaum muslimsunnah dan syiah, sedangkan al-Qaeda tidak membedakan kaum muslim. ISIS kelompok yang terbuka dan modern, sedangkan al-Qaeda kelompok yang tertutup dan elit. ISIS menyerang pihak-pihak yang menentang keberadaan mereka, sedangkan al-Qaeda menyerang pihak barat khususnya Amerika Serikat dan sekutunya.

ISIS menganut paham radikal, karena dalam mewujudkan misinya selalu menggunakan cara-cara kekerasan yang brutal dan menjadikan hukum-hukum Islam sebagai dasar dalam melakukan aksi kejahatan, walaupun perilaku tersebut bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Islam ([www.risalahmujahidin.com:2015](http://www.risalahmujahidin.com:2015)). Dalam melakukan aksi kejahatan, ISIS mengedepankan motivasi berjihad kepada semua anggota untuk mendirikan *Khilafah Islamiyyah*. Pada 9 April 2013, ISIS berhasil menguasai Raqqa di Suriah dan menjadikan kota tersebut sebagai basis utamanya di Timur Tengah. Kemudian pada tahun 2014, ISIS juga menguasai beberapa kota di Irak antara lain Anbar, Fallujah, Mosul dan Ramadi. Pada 29 Juni 2014, pemimpin ISIS secara langsung mengubah nama kelompok mereka menjadi *Islamic State (IS)*. ISIS dipimpin oleh seorang pria bernama Abu Bakar al-Baghdadi. Al-Baghdadi dikenal sebagai komandan perang dan ahli dalam taktik ([www.bbc.com:2014](http://www.bbc.com:2014)). Oleh karena itu, ISIS memiliki sebuah divisi bernama "*The War Office*" yang mengelola logistik dan teknik perang. ISIS juga memiliki divisi khusus media bernama "*Institut Produksi Al-Furqan*" yang telah memproduksi cd, dvd, poster dan website propaganda, serta merilis "*Ajnad Media Foundation*" yang melantunkan nasyid jihad (Waspada ISIS. 2015:25). Alasan ISIS memiliki divisi khusus media adalah untuk menyebarkan propaganda yang bertujuan untuk mempengaruhi pola pikir individu atau kelompok agar bersedia ikut dan bergabung bersama mereka (Islam Bukan ISIS. 2016:23).

Salah satu propaganda visual yang dilakukan anggota ISIS melalui media online (youtube) yang dipublikasikan pada tahun 2014 dengan judul "*Join The Ranks*" memunculkan sosok pria yang teridentifikasi sebagai warga negara Indonesia (WNI) bernama Bahrumisyah alias Abu Muhammad al-Indonesi. Dalam video tersebut, ia melakukan aksi provokatif melalui pesan dakwah berupa hijrah, jihad dan daulah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pesan utama yang terkandung dalam video tersebut adalah meminta dukungan terhadap perjuangan ISIS menjadi khilafah dunia serta ajakan untuk bergabung dan berjihad bersama ISIS. Sasaran utama propaganda visual tersebut adalah masyarakat dunia dan khususnya warga negara Indonesia. Pemberitaan mengenai ISIS menarik perhatian masyarakat dunia termasuk di Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat mengecam aksi kejahatan yang dilakukan ISIS dan menolak pahamnya yang radikal meskipun ada kelompok-kelompok yang menyatakan dukungannya terhadap ISIS. Kecaman dan penolakan terhadap ISIS muncul dari kalangan ulama, kelompok Islam moderat, masyarakat sipil, instansi pemerintah dan para akademisi. Bukti penolakan atas keberadaan ISIS dapat dilihat dalam pernyataan yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada pertengahan tahun 2014 yakni paham dan perilaku yang dimiliki ISIS adalah haram. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) telah menginstruksikan kepada anggota Polri dan TNI untuk melakukan langkah tegas dengan menangkap para simpatisan ISIS yang ada di Indonesia ([www.m.republika.co.id:2014](http://www.m.republika.co.id:2014)).

BNPT sebagai lembaga yang melaksanakan tugas di bidang penanggulangan terorisme telah mendeteksi masuknya paham radikal ISIS ke Indonesia. Melalui pengamatan sejak tahun 2013, BNPT menyatakan bahwa paham radikal ISIS masuk ke Indonesia melalui jaringan internet dan para WNI simpatisan ISIS yang kembali dari Irak dan Suriah. Paham radikal ISIS dipercaya membawa dampak negatif karena dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat dan dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai contoh, adanya perdebatan antara pihak yang pro dan kontra terhadap ISIS dapat memecah persaudaraan diantara umat Islam di Indonesia serta mendorong bangkitnya kelompok-kelompok radikal lokal yang bekerja dibawah perintah ISIS sehingga meningkatkan potensi ancaman terorisme. Oleh karena itu, menghadang persebaran paham radikal dan aksi kejahatan terorisme dari para simpatisan ISIS di Indonesia, maka BNPT telah mengambil langkah tegas untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka menghadapi dan menanggulangi ancaman keamanan tersebut.

### **Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

#### ***Konsep Radikalisme dan Deradikalisasi***

Radikal dapat diartikan sebagai suatu sikap yang berpihak ataupun mendukung suatu ide pemikiran secara penuh yang berfokus pada suatu tujuan serta memiliki sifat yang aktif dan reaktif. Radikalisme berasal dari bahasa latin yaitu *radix* yang berarti akar dan *isme* yang berarti sebuah paham (Samad Duski. Radikalisme dan Antisipasi ISIS). Radikalisme pada dasarnya mempunyai makna yang netral. Namun, apabila radikalisme dibawa ke wilayah yang sedang berkonflik, maka makna radikalisme menjadi negatif. Selain itu, makna radikalisme tidaklah tunggal, tetapi bergantung pada konteksnya. Dalam konteks terorisme, maka radikalisme merupakan kekerasan. Hal ini karena adanya kecenderungan sikap yang keras dan agresif dalam mewujudkan sesuatu. Namun dalam konteks pemikiran atau gagasan, radikalisme bukan merupakan kekerasan, sehingga tidak menjadi persoalan sejauh tidak menimbulkan potensi yang dapat membahayakan.

Dapat diperhatikan secara saksama, akar penyebab munculnya radikalisme berawal dari faktor ideologi. Walaupun faktor ideologi tidak berdiri sendiri, tetapi ada pengaruh dari faktor-faktor lainnya. Apabila faktor ideologi tidak bertemu dengan faktor lainnya, maka aksi kejahatan tidak akan pernah terjadi. Radikalisme muncul dengan berbagai penyebab seperti adanya keterbelakangan dalam pendidikan, tekanan politik penguasa, kegagalan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan implementasinya di dalam kehidupan masyarakat, kemiskinan serta keberadaan hegemoni barat dapat memancing seseorang memiliki perilaku radikalisme yang bisa berakhir dengan aksi kejahatan yang merugikan. Radikalisme dapat dimaknai berbeda di antara kelompok kepentingan. Dalam kelompok keagamaan, radikalisme merupakan gerakan-gerakan berlandaskan agama yang berusaha merubah secara keseluruhan tatanan sosial dan politik yang telah ada dengan menggunakan cara kekerasan. Radikalisme keagamaan berpangkal dari gerakan politik yang mendasari diri pada suatu doktrin agama yang fundamental secara penuh (Agus S.B. Deradikalisasi Nusantara. 2016:48).

Gerakan radikalisme yang berhubungan dengan agama sebenarnya lebih terkait dengan *a community of believe* ketimbang *body of believe* (Scott M. Thomas:2005). Kemunculan radikalisme Islam sebagai dua tarikan berseberangan yakni masalah ideologi dan politik, Islam akan berada di tengahnya. Sebagian manusia memahami radikalisme secara dangkal sebagai substansi ajaran Islam. Sementara fenomena politik dan ideologi terabaikan. Radikalisme Islam terbagi ke dalam dua makna yakni sebagai wacana dan aksi. Radikalisme Islam “wacana” diartikan sebagai suatu pemikiran untuk mendirikan negara Islam (*Khilafah Islamiyyah*) tanpa menggunakan kekerasan terbuka. Sedangkan radikalisme Islam “aksi” diwujudkan dengan melakukan perubahan menggunakan cara-cara kekerasan atas nama agama.

Dalam menghadapi ancaman radikalisme dapat ditanggulangi dengan deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan suatu upaya mengurangi atau menghentikan kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisasi paham radikal yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kejahatan radikal. Tujuan umum deradikalisasi adalah untuk membuat individu atau kelompok yang melakukan aksi kejahatan bersedia meninggalkan atau melepaskan diri dari aksi kejahatan radikal. Tujuan khusus deradikalisasi adalah mengubah pemikiran pihak-pihak yang menganut paham radikal menjadi pemikiran yang moderat dan toleran. Menurut Darcy M.E. Noricks, deradikalisasi dapat dipahami baik secara ideologis atau perilaku. Deradikalisasi sebagai suatu proses mengarahkan individu atau kelompok untuk mengubah perilaku kekerasan, khususnya kekerasan yang ditujukan pada warga sipil. Deradikalisasi selalu merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia (HAM).

### ***Konsep Keamanan Nasional***

Keamanan merupakan kondisi yang terbebas dari ancaman militer atau kemampuan suatu negara untuk melindungi negara dan bangsanya dari serangan yang berasal dari lingkungan eksternal. Keamanan dipahami sebagai konsep yang multidimensional (Djoko Santoso. 2007:7). Keamanan secara umum sebagai kemampuan untuk mempertahankan diri (*survival*) dalam menghadapi ancaman yang nyata (*exixtential threat*) dan pendekatan keamanan yang harus dapat dicapai dilandaskan pada konsep keamanan nasional yang melalui penggunaan kekuatan (*power*), perjuangan dalam mempertahankan diri (*struggle for political survival*) dan kondisi keamanan yang dapat diperoleh melalui penggunaan dan pengembangan kapabilitas militer (*accommodation*). Adanya pergeseran dalam konsep keamanan jelas menyatakan bahwa konsep ini tidak lagi terpusat pada negara melainkan terpusat pada individu dan masyarakat di suatu negara. Ancaman keamanan nasional tidak hanya berasal dari militer tetapi juga berasal dari non-militer seperti politik, sosial, ekonomi dan lingkungan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa “*The concept of security must change an exclusive stress on national security to a much greater stress on human development, from territorial to food, employment and environmental security*” (United Nation Development Program-UNDP. 1993). Keamanan nasional diartikan sebagai kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, militer serta pengembangan diplomasi. Keamanan nasional menjadi perwujudan dari konsep keamanan secara menyeluruh yang memiliki empat dimensi yakni dimensi pertahanan (*defence*), dimensi stabilitas dalam negeri (*internal*

*security*), dimensi ketertiban publik (*public security*) dan dimensi keselamatan insan (*human security*) (Hari Prihartono. 2007:28).

### **Konsep Terorisme dan Kontra-Terrorisme**

Istilah terorisme berasal dari kata latin yaitu “*terrere*” yang memiliki arti menggetarkan. Kata “*terror*” dapat menimbulkan ketakutan (Abdul Wahid, dkk. 2004:22). Secara umum terorisme merupakan suatu tindakan atau aksi yang memiliki tujuan untuk menyebabkan ketakutan, ancaman maupun eksistensi kelompok tertentu. Sedangkan, jika mengacu pada Perpu Nomor 1 Tahun 2003 kejahatan terorisme merupakan tindakan atau aksi yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dengan menimbulkan korban yang bersifat massal, caranya dengan melakukan perampasan kemerdekaan (hilangnya nyawa) dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Dalam perkembangannya, terorisme tidak lain memiliki hubungan dengan tujuan politik. Hal ini, karena tindakan atau aksi teror dinilai sebagai perbuatan jihad yang terpuji dalam rangka mewujudkan *Khilafah Islamiyyah*. Dianggap sebagai perbuatan jihad, karena kelompok-kelompok teroris menggunakan dalil agama yang diterjemahkan secara dangkal sebagai bentuk pembenaran dalam tindakan atau aksinya. Terorisme mengalami perluasan paradigma yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai *crimes against state*, termasuk pembunuhan dan percobaan pembunuhan kepala negara atau anggota keluarganya berubah menjadi *crimes against humanity* dimana yang menjadi korbannya adalah masyarakat sipil. Untuk menghadapi berbagai aksi kejahatan terorisme dibutuhkan penanggulangan yang komprehensif dalam mengungkap motif dan pelaku dibalik aksi kejahatan terorisme tersebut, serta akar penyebab yang mendasari. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kebijakan untuk menghadapi dan menanggulangi aksi kejahatan terorisme, salah satunya dengan menggunakan strategi kontra-terorisme.

Kontra-terorisme merupakan suatu upaya dalam menghadang dan menanggulangi persebaran dari aksi kejahatan terorisme. Kontra-terorisme dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Kontra-terorisme secara internal dapat dilakukan dengan *carapreparation, prevention, protection* dan *pursuit*. Cara *preparation* yaitu melakukan persiapan dalam menghadapi konsekuensi yang diakibatkan oleh persebaran paham radikal dan aksi kejahatan terorisme. Cara *prevention* yaitu melakukan pencegahan kepada individu atau kelompok dalam menghadapi persebaran paham radikal agar tidak menimbulkan keinginan untuk melakukan aksi kejahatan terorisme. Cara *protection* yaitu memberikan perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat dan fasilitas negara dari ancaman tindakan radikalisme dan terorisme. Cara *pursuit* yaitu melakukan penindakan, kesiapsiagaan dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kejahatan terorisme. Sedangkan, kontra-terorisme secara eksternal dapat dilakukan dengan cara kerjasama internasional.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menjelaskan upaya yang dilakukan oleh BNPT dalam menghadapi ancaman keamanan dari kelompok radikal ISIS (*Islamic*

*State of Iraq and Syria*). Penelitian ini menggunakan jenis data perpaduan antara data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan di Kantor BNPT dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai macam literatur seperti buku, e-book, majalah, jurnal, artikel, website resmi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian penulis dengan tingkat kebenaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menganalisis data sekunder kemudian menggunakan teori dan konsep untuk menjelaskan suatu fenomena yang sedang diteliti yaitu upaya BNPT dalam menghadapi ancaman keamanan dari kelompok radikal ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*).

### **Hasil Penelitian**

#### ***Isu Radikalisme di Indonesia***

Di Indonesia keberadaan paham radikal telah hadir sejak awal kemerdekaan. Tetapi dalam proses transisi dari era orde baru menjadi era reformasi menyebabkan peningkatan terhadap aksi kejahatan dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang brutal. Dapat dilihat dalam beberapa kasus seperti konflik antara suku Dayak dan Madura di Sampit, Kalimantan Tengah pada tahun 2001 serta konflik agama dan suku di Ambon, Maluku pada tahun 1999 dan Poso, Sulawesi Tengah pada periode tahun 1998-2000 (Chairuddin Islamil. 2015). Setiap tahun paham radikal terus membentuk model-model baru sehingga mampu menarik perhatian banyak pihak yang akan dengan mudah terpengaruh. Para investor paham radikal terus memproduksi kelompok, nama dan lambang baru. Dalam situasi yang tidak stabil seperti adanya kekacauan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta krisis keagamaan dimanfaatkan oleh para investor untuk menawarkan solusi. Pokok pembicaraan yang menjadi bahan utama adalah anti-keanekaragaman disertai penafsiran yang berlebihan terhadap teks atau kitab suci tertentu. Mereka memandang berdasarkan pengetahuan yang dangkal tanpa memahami maknanya secara menyeluruh.

Adanya aksi kejahatan radikal yang berlandaskan agama di Indonesia tidak lahir dengan sendiri, tetapi mendapat pengaruh dari lingkungan eksternal yang berasal dari Timur Tengah. Bukti adanya pengaruh dari Timur Tengah dapat dilihat dalam hubungan antara al-Qaeda dengan kelompok radikal lokal Jamaah Islamiyyah (JI). Hubungan keduanya telah menjelaskan bahwa paham radikal dan aksi kejahatan terorisme dilakukan oleh kelompok *sub-state* bukan *state* yang memiliki jaringan internasional, sehingga situasi ini disebut dengan terorisme trans-nasional. Kelompok JI telah melakukan serangkaian aksi kejahatan terorisme seperti serangan Bom Bali I pada tahun 2002 dan Bom Bali II pada tahun 2005, peledakan bom di Hotel J.W Marriot pada tahun 2003 dan 2009 serta peledakan bom di Hotel Ritz Charlton pada tahun 2009. Tujuan aksi kejahatan tersebut adalah untuk membuktikan eksistensi diri dan upaya mendirikan negara berdasarkan syariat Islam di Indonesia (Agus S.B. Op cit). Belum berakhir kekhawatiran masyarakat Indonesia dengan keberadaan paham radikal dan aksi kejahatan terorisme dari kelompok JI, pada tahun 2014 Indonesia kembali dihadapkan dengan ancaman keamanan dari sebuah kelompok yang dikenal dengan nama *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS).

### ***Ancaman dan Dampak ISIS di Indonesia***

Sejak tahun 2014, paham radikal ISIS mulai berkembang di Indonesia. Berbagai cara dilakukan oleh ISIS untuk menyebarkan berita ataupun informasi terkait keberadaannya. Cara yang digunakan antara lain melalui jaringan internet terutama website propaganda lokal seperti <http://al-mustaqbal.net>; melalui media sosial seperti facebook, twitter dan youtube; melalui kepulauan para WNI simpatisan ISIS yang kembali dari Irak dan Suriah. Alasan paham radikal ISIS dapat dengan mudah diterima oleh sejumlah masyarakat Indonesia diantaranya adanya ketidakadilan dan rasa kecewa terhadap pemerintah; adanya keinginan untuk menjadi *martir* (syahid) karena telah memperjuangkan agama dari kaum *thoghut* (kafir); adanya pemahaman yang sangat rendah tentang agama khususnya Islam di kalangan generasi muda (Muhammad A.S. Hikam. Deradikalisasi. 2016:37); serta adanya toleransi yang tinggi terhadap kebebasan beragama yang akhirnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkenalkan paham radikal ISIS. Di Indonesia terdapat sejumlah kelompok radikal pendukung ISIS yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia diantaranya kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang dipimpin oleh Santoso, kelompok Mujahidin Indonesia Barat (MIB) yang dipimpin oleh Bahrumisyah (Abu Muhammad al-Indonesi), kelompok Katibah Masyaariq yang dipimpin oleh Salim Attamimi (Abu Jandal al Yamani al Indonesi), Laskar Jundullah yang diketuai oleh Agung Hamid dan Aktivistis Syariat Islam (FAKSI) yang diketuai oleh Muhammad Fachry. Selain menjadi tokoh dari kelompok radikal lokal pendukung ISIS di Indonesia, mereka dan para simpatisan ISIS lainnya juga melakukan sejumlah aksi kejahatan seperti yang terjadi sepanjang tahun 2016 dengan modus operasi yang sama yaitu serangan bom bunuh diri dan penikaman yang ditujukan kepada aparat keamanan dan warga sipil.

Ancaman yang disebabkan oleh adanya persebaran paham radikal dan aksi kejahatan terorisme sejak tahun 2014 hingga 2016 telah menimbulkan dampak negatif. Aspek kehidupan yang mengalami kerugian diantaranya bidang politik, adanya kebijakan dari pemerintah yang lebih menguntungkan golongan atas menyebabkan golongan bawah merasa tidak puas terhadap proses berjalannya demokrasi. Oleh karena itu, masuknya paham radikal ISIS ke Indonesia dengan mudah diterima dan telah mempengaruhi sejumlah individu untuk membantu mewujudkan misi ISIS yaitu mendirikan *Khilafah Islamiyyah* di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Terdapat simpatisan ISIS yang berusaha melakukan penyerangan terhadap objek vital negara yang dianggap sebagai simbol dan bagian dari demokrasi seperti gedung DPR, Markas Besar Polri, Lapas dan Stasiun TV. Bidang pendidikan, sejumlah lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan dicurigai terlibat dalam mendukung persebaran paham radikal ISIS. Kemudian, sejumlah ulama dan tokoh agama yang dulu menjadi panutan bagi masyarakat sebelum masuknya paham radikal ISIS, kini dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab atas meningkatnya aksi kejahatan terorisme di berbagai wilayah Indonesia.

### ***Profil Lembaga BNPT***

Dalam upaya menghadapi dan menanggulangi berbagai permasalahan yang disebabkan oleh paham radikal dan aksi kejahatan terorisme. Maka pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk membentuk sebuah lembaga yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai *leading sector* yang memiliki

wewenang dalam menyusun dan membentuk kebijakan strategis serta menjadi koordinator dalam bidang penanggulangan terorisme. BNPT resmi berdiri pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Visi yang dimiliki BNPT adalah mewujudkan penanggulangan terorisme dan radikalisme yang dinamis melalui upaya sinergi institusi pemerintah dan masyarakat untuk meminimalkan ancaman terorisme. Sedangkan, misi BNPT adalah melakukan upaya pencegahan aksi terorisme, meningkatkan kewaspadaan dan memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan objek-objek vital yang berpotensi menjadi target sasaran terorisme, melakukan penindakan aksi terorisme melalui penggalangan intelijen dan surveillance dan penegakan hukum melalui koordinasi dan kerjasama dengan institusi terkait, masyarakat dan seluruh komponen bangsa, melakukan pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan nasional terhadap ancaman aksi terorisme, melakukan kerjasama internasional baik secara bilateral, regional, internasional dan melaksanakan perangkat hukum internasional serta perlindungan WNI di luar negeri secara aktif dari ancaman aksi terorisme. Berdasarkan struktur organisasi, BNPT terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Deputi II Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Deputi III Bidang Kerjasama Internasional serta Inspektorat.

Berdasarkan pada visi dan misi serta statusnya sebagai *leading sector*. Maka, BNPT telah melakukan berbagai upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan yang dilakukan BNPT terbagi menjadi dua yaitu upaya internal dan upaya eksternal.

### ***Upaya Internal***

Upaya internal dilakukan dengan cara *preparation, prevention, protection* dan *pursuit*.

#### ***1. Preparation***

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman modern berhasil dimanfaatkan oleh kelompok radikal dalam melaksanakan aksi kejahatan menggunakan bahan-bahan berbahaya dengan unsur kimia, biologi, radiologi dan nuklir (KBRN). Oleh karena itu, melalui Direktorat Pembinaan Kemampuan BNPT melaksanakan pembekalan tentang "*Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) KBRN*" di Medan pada 19 April 2016. Tujuan pembekalan tersebut adalah untuk mengantisipasi dan meningkatkan pemahaman serta kemampuan terhadap SOP penanggulangan terorisme yang menggunakan unsur-unsur berbahaya KBRN (Merawat Kebhinekaan Dalam Bingkai NKRI. 2016:40-41). Kemudian melakukan "*Focus Group Discussion (FGD) Foreign Terrorist Fighters (FTF) dan Hate Speech*" di DKI Jakarta pada 30 November 2016. FGD ini bertujuan untuk melakukan koordinasi terhadap *FTF* dan *Hate Speech* dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Dalam *FGD* tersebut langkah antisipasi juga dipersiapkan dalam menghadapi kepulangan WNI simpatisan ISIS yang kembali dari Irak dan Suriah. Peserta yang menghadiri *FGD* berasal dari Komisi III DPR RI, Perwakilan dari *International Centre for Counter-Terrorism (ICCT)*, Hakim Pengadilan DKI Jakarta, Densus 88 Anti-Terror, Kejaksaan Agung, Keimigrasian dan Satgas KBRN. Selain itu, Direktorat Pembinaan Kemampuan juga melakukan kegiatan bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam mengantisipasi persebaran paham radikal dan aksi kejahatan terorisme (Memperkuat Sinergi Negara dan Masyarakat. 2016:31) serta melakukan pelatihan bersama anggota Polri dan TNI dibawah koordinasi BNPT



untuk penindakan terhadap para pelaku terorisme serta melakukan deteksi dan investigasi krisis akibat aksi kejahatan terorisme.

## **2. Prevention**

Propaganda yang terus disebarkan oleh para simpatisan maupun kelompok ISIS dan seruan berjihad untuk mendirikan *Khilafah Islamiyyah* telah mempengaruhi cara berfikir setiap individu maupun kelompok. Agar propaganda dan seruan tidak semakin meluas, maka melalui Direktorat Pencegahan BNPT melakukan kegiatan dialog dan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Pencegahan BNPT diantaranya memberikan pembekalan kepada mahasiswa-mahasiswi di Universitas Hasanuddin, Makassar pada bulan September 2014. Pembekalan tersebut mengangkat tema tentang “*Strategi Menangkal Propaganda ISIS*”. Kemudian sosialisasi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Ancaman Terorisme dengan tema “*SOP Sistem Keamanan Kantor Pemerintahan Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme*”. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh peserta dari Kementerian, Polri, TNI, Aktivis Kontra-Terrorisme, Akademisi dan Mahasiswa Akademi Kepolisian (AKPOL).

Selain itu terdapat sejumlah kegiatan lain yang dilakukan oleh Direktorat Pencegahan BNPT selama periode tahun 2014 hingga 2016:

- a. Sasaran (Bidang Pendidikan Tinggi)
  - 1) *Training of Trainer* (TOT) Anti Radikal Terorisme kepada rektor dan dosen;
  - 2) *Training of Trainer* (TOT) Anti Radikal Terorisme kepada mahasiswa/i.
  
- b. Sasaran (Bidang Pendidikan Menengah)
  - 1) *Training of Trainer* (TOT) Anti Radikal Terorisme kepada guru Pembina serta siswa/I pengurus OSIS dan ROHIS;
  - 2) Lomba penulisan esai tentang “**Hidup Damai Dalam Bingkai NKRI**” bagi siswa/i SMA sederajat di seluruh Indonesia.
  
- c. Sasaran (Bidang Pendidikan Agama)
  - 1) Studi profiling Lemdik Keagamaan untuk mencegah paham radikal terorisme;
  - 2) *Training of Trainer* (TOT) Anti Radikal Terorisme kepada santri dan pengurus pesantren;
  - 3) Silaturahmi nasional tentang *Wal Ahlussunah Wal Jamaah* dan penanggulangan terorisme dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

Kegiatan pencegahan lain yang telah dilakukan BNPT adalah membentuk perkumpulan masyarakat yang dikenal dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). FKPT dibentuk sebagai mitra strategis dan menjadi perwakilan BNPT di daerah. Adanya FKPT di daerah dapat memudahkan koordinasi dan pelaksanaan program pencegahan yang dilakukan oleh BNPT. FKPT telah terbentuk sejak tahun 2012. Pada tahun 2016 jumlah FKPT sebanyak 32 forum perwakilan yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Deradikalisasi merupakan proses menciptakan lingkungan yang damai, mencegah

tumbuhnya kelompok-kelompok radikal dengan cara menanggapi “*root causes*” (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok tersebut (International Crisis Group. 2007:1). Program deradikalisasi di Indonesia tidak hanya dilakukan sebagai upaya merehabilitasi tetapi juga sebagai upaya kontra-ideologi dan deideologisasi. Dengan demikian, deradikalisasi dapat melakukan pencegahan dini paham radikal. Deradikalisasi ditujukan kepada para pendukung kelompok radikal terorisme, para narapidana dan mantan narapidana terorisme serta kelompok masyarakat sipil yang memiliki posisi strategis (Muhammad A.S. Hikam. Opcit.80). Pelaksanaan deradikalisasi akan melibatkan tiga manajemen yakni manajemen substansi yang akan dilakukan oleh Direktorat Deradikalisasi, manajemen administrasi yang akan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Lapas dan manajemen keamanan yang berada di bawah kendali langsung Polri.

Deradikalisasi terdiri dari 4 tahapan yaitu identifikasi, rehabilitasi, reedukasi dan resosialisasi. Kontra-radikalisasi merupakan kelanjutan dari pelaksanaan program deradikalisasi. Kontra-radikalisasi dilaksanakan di luar lapas dan wajib diikuti oleh para mantan narapidana terorisme termasuk keluarga dan jaringannya. Kontra-radikalisasi adalah upaya melakukan penangkalan paham radikal terorisme kepada individu atau kelompok dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan daya tahan terhadap pengaruh negatif paham radikal. Dalam kontra-radikalisasi terdiri dari:

a. Pembinaan Wawasan Keagamaan

Dakwah atau ceramah yang damai menjadi alternative dalam pembinaan dan menguatkan wawasan keagamaan bagi para mantan narapidana teroris dan keluarganya. BNPT dan Kementerian Agama RI bekerjasama dalam memaksimalkan peran penyuluh keagamaan yang bertugas memberikan pendampingan (<https://damailahindonesiaku.com:2016>).

b. Pembinaan Wawasan Kebangsaan

BNPT bersama tokoh nasional dari Kementerian dan wakil rakyat khususnya Komisi III (Bidang Hukum, HAM dan Keamanan) melakukan pembinaan dengan menekankan pada 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI kepada para mantan narapidana teroris (<https://damailahindonesiaku.com:2016>).

c. Pembinaan Wawasan Kemandirian/Kewirausahaan

Pembinaan diwujudkan dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan workshop yang dilakukan secara berkelanjutan. Pembinaan ini diberikan kepada para mantan narapidana teroris. Pendampingan dilakukan oleh sejumlah koperasi di seluruh wilayah di Indonesia. Cara yang digunakan adalah menyediakan modal bergulir kepada para mantan narapidana teroris yang tinggal berdekatan dengan koperasi. Selain itu, mereka juga dapat menjadi anggota koperasi untuk mendapatkan modal usaha yang disesuaikan dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki (<https://damailahindonesiaku.com:2016>).

Dalam menghadang persebaran paham radikal dan propaganda ISIS, BNPT memiliki strategi yang terbagi ke dalam dua program yaitu kontra-ideologi dan kontra-narasi. Kontra-ideologi dapat diaplikasikan melalui penguatan ideologi bangsa, penerapan ideologi bangsa dalam kurikulum pendidikan dan melibatkan beberapa mantan narapidana terorisme untuk ikut serta dalam memberikan pembinaan serta bimbingan kepada mereka yang terlibat dalam tindakan radikalisme dan terorisme. Sedangkan, kontra-narasi dapat diaplikasikan dengan merekrut generasi muda pengiat media sosial dan internet untuk menjadi duta damai serta memproduksi website damai seperti [www.aku.dutadamai.id](http://www.aku.dutadamai.id) dan [www.bhinneka.dutadamai.id](http://www.bhinneka.dutadamai.id) yang terkoneksi langsung dengan pusat media damai BNPT.

### **3. Protection**

Dalam menghadapi ancaman radikal dan aksi kejahatan terorisme BNPT melakukan upaya perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat dan fasilitas public. Cara ini dapat diwujudkan dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder, menyusun database dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sistem keamanan serta sosialisasi sistem keamanan.

#### **a. BNPT dan Polri**

Melalui kegiatan seminar nasional dengan tema “*Preventive Justice* Dalam Antisipasi Perkembangan Ancaman Terorisme” yang dilaksanakan pada 6 Desember 2016, BNPT bersama Polri sepakat untuk bekerjasama yang dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan terorisme. Isi dari MoU tersebut antara lain: terkait keterlibatan anggota Polri dalam membantu BNPT mencegah perkembangan paham radikal dan monitoring pergerakan para mantan narapidana teroris yang telah bebas dari lapas (<http://ntmcpolri.info/:2016>), terkait pengamanan program deradikalisasi yang akan dimulai pada tahun 2017 di pusat deradikalisasi Sentul, Bogor, Jawa Barat, terakhir terkait keterlibatan Densus 88 Anti-Terror dalam membantu BNPT melakukan penindakan terhadap terduga simpatisan kelompok radikal maupun pelaku aksi kejahatan terorisme.

#### **b. BNPT dan Komnas HAM**

BNPT dan Komnas HAM sepakat untuk bekerjasama yang dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada 18 Agustus 2016 bertempat di Kantor BNPT Sentul, Bogor, Jawa Barat. Fokus dari kerjasama ini adalah penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM kepada para pelaku aksi kejatana teroris dan para narapidana. Dengan berdasarkan pada prinsip due process of law ([www.komnasham.go.id:2016](http://www.komnasham.go.id:2016)).

#### **c. BNPT dan Kementerian Agama RI**

BNPT dan Kemenag RI sepakat untuk bekerjasama dalam rangka penanggulangan terorisme yang dituangkan dalam penandatanganan MoU pada 28 Oktober 2015 di Yogyakarta. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pencegahan dan menanggulangi terorisme di seluruh wilayah Indonesia melalui pendekatan keagamaan (<http://bimaislam.kemenag.go.id>. 2016).

#### **4. Pursuit**

Melalui Direktorat Penindakan dan Kesiapsiagaan BNPT melakukan program kerja diantaranya melakukan operasi intel penggalangan yang ditujukan kepada para simpatisan maupun kelompok radikal lokal dalam rangka mendukung operasi penegakan hukum oleh Polri, menekankan pada kemampuan deteksi dengan koordinasi intelijen dan satgas melakukan penyelidikan secara ilmiah. Kemudian melakukan penetrasi dalam kegiatan kelompok radikal Jamaah Islamiyyah (JI) dan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) serta kelompok pendukung ISIS lainnya yang berada daerah di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan NTB serta melakukan rapat koordinasi antara aparat penegak hukum terkait barang bukti, saksi mahkota, proses penempatan narapidana dan persidangan perkara pidana terorisme yang dilaksanakan di beberapa daerah besar di Indonesia seperti Kalimantan Timur pada 28 Juni 2016, Jawa Timur pada 7 April 2016 dan Jawa Tengah 14 April 2016.

#### **Upaya Eksternal**

Upaya eksternal dilakukan dengan cara kerjasama internasional baik secara bilateral, regional dan multilateral.

##### **1. Kerjasama Bilateral**

Dalam rangka mengatasi dan menanggulangi aksi kejahatan radikal dan terorisme yang dilakukan oleh ISIS, BNPT telah melakukan berbagai kerjasama baik di tingkat regional maupun internasional dengan negara-negara di penjuru dunia, diantaranya: Indonesia-Rusia, Kepala BNPT Saud Usman Nasution (periode 2014-2016) bersama Wakil Menteri Federasi Rusia Oleg Syromolotov melakukan pertemuan dengan topik pembicaraan mengenai permasalahan terorisme internasional dan fenomena *Foreign Terrorist Fighters* (FTF). Perwakilan kedua negara melakukan pertukaran informasi yang berkaitan dengan isu radikalisme di dalam lingkungan masyarakat, termasuk dalam konteks meminimalisasi ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara (<http://indonesia.rbth.com:2016>); Indonesia-Spanyol, Kepala BNPT Saud Usman Nasution bersama Sekretaris Negara bidang Keamanan Kerajaan Spanyol Francisco Martinez Vazquez sepakat bekerjasama dalam penanggulangan terorisme dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Dalam MoU kerjasama dilakukan dalam pertukaran informasi intelijen dan informasi strategis kelompok teroris dan model kejahatan yang berkembang di kedua negara. Selain itu, kedua negara telah setuju meningkatkan kerjasama antara aparat keamanan dan penegak hukum serta bertukar pengalaman terkait penanggulangan terorisme (<https://damailahindonesiaku.com>:2015); Indonesia-Filipina, Kerjasama antara BNPT dan Dewan Anti-Terrorisme Filipina di sepakati dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Dalam MoU berisi kerangka kerja dalam mencegah, menekan, memerangi terorisme internasional dan kejahatan lintas negara yang terorganisir terkait dengan terorisme. Selain itu, kerjasama dilakukan untuk melakukan pertukaran informasi intelijen, memperkuat pengembangan kapasitas dan kemampuan melalui program pelatihan dan saling berkunjung dalam upaya penanggulangan terorisme, pelaksanaan program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi serta penanganan

*cyber terrorism (Nota Kesepahaman Antara BNPT dan Filipina)*; Indonesia-Italia, BNPT bersama Komisi Analisis Strategi Anti-Terrorisme (CASA) menyetujui rencana kerjasama penanggulangan terorisme yang disampaikan oleh BNPT khususnya terkait pelaksanaan program deradikalisasi. Karena Italia belum memiliki program nasional untuk deradikalisasi dan permasalahan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF). Pihak CASA menyatakan kerjasama dalam pertukaran informasi dapat dilakukan secara langsung dari *agency to agency* (<http://nasional.kompas.com:2016>); Indonesia-Belanda, BNPT bertemu dengan *National Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid* (NCTV). Dalam pertemuan tersebut BNPT menjelaskan kerjasama Indonesia dan Belanda di bidang penanggulangan terorisme berjalan dengan baik khususnya melalui kerjasama *capacity building* di Lembaga Kepolisian dan *counter terrorism* melalui *Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) (Membangun Sinergi Meningkatkan Kewaspadaan. 2016:61).

## **2. Kerjasama Regional dan Multilateral**

Dalam menghadapi ancaman keamanan dari kelompok radikal ISIS. BNPT turut hadir dalam pertemuan internasional seperti *Global Counter Terrorism Forum* (GCTF) *Coordinating Committee and Countering Violent Extremism Working Group* di Den Haag, Belanda. Dalam forum tersebut, perwakilan BNPT dari Deputi III Bidang Kerjasama Internasional bersama Duta Besar RI untuk Belanda dan Atase Kepolisian RI membagikan pengalaman dan melakukan upaya untuk mendorong peningkatan kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme. Pembahasan dalam forum tersebut antara lain terkait isu *Countering Violent Extremis* (EVE) dengan tujuan untuk mensinergikan penguatan langkah-langkah konkret lintas batas yang dapat dilakukan melalui kerjasama di tingkat lokal, nasional serta global dalam mengantisipasi berbagai macam bentuk kekerasan ekstrimisme. Forum tersebut diselenggarakan dengan maksud untuk memfasilitasi *sharing lesson learned* dan dukungan kepada rencana aksi nasional (*national action plan*) di masing-masing negara anggota GCTF. Berikutnya, *The General Briefing on Counter-Terrorism* di Jakarta, Indonesia. Dalam forum tersebut, BNPT bersama dengan duta besar negara sahabat dan perwakilan negara-negara dunia membahas isu tentang terorisme yang menjadi ancaman global dan kemunculan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF). BNPT secara tegas mengajak seluruh peserta forum untuk ikut berpartisipasi dalam melawan dan menanggulangi terorisme secara bersama-sama.

## **Kesimpulan**

BNPT sebagai *leading sector* dalam bidang penanggulangan terorisme telah melakukan berbagai upaya penanggulangan dalam menghadapi ancaman keamanan yang disebabkan oleh kelompok radikal ISIS. Upaya penanggulangan tersebut terbagi menjadi dua yaitu upaya internal dan eksternal. Upaya internal dilakukan dengan cara *preparation* diwujudkan melalui kegiatan pembekalan dan pelatihan. Cara *prevention* diwujudkan melalui kegiatan dialog dan sosialisasi; kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT); pelaksanaan program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi; pelaksanaan program kontra-ideologi dan kontra-narasi. Cara *protection* diwujudkan melalui koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder; sosialisasi sistem

keamanan. Cara *pursuit* diwujudkan melalui penindakan; kesiapsiagaan dan penegakan hukum. Sedangkan upaya eksternal dilakukan dengan cara kerjasama internasional dengan negara lain baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Kerjasama bilateral yang dilakukan bersama negara lain selama periode tahun 2014 hingga 2016 antara lain Rusia, Spanyol, Filipina, Italia dan Belanda. Kerjasama regional dan multilateral dilakukan dengan menghadiri pertemuan seperti *Global Counter Terrorism Forum (GCFT) Coordinating Committee and Countering Violent Extremism Working Group* di Den Haag, Belanda dan *The General Briefing on Counter-Terrorism* di Jakarta, Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

Bakti, Agus Surya. 2016. *Deradikalisasi Nusantara. Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melaan Radikalisasi dan Terorisme*. Cetakan I. Jakarta.

Hikam, Muhammad A.S. 2016. *Deradikalisasi. Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Cetakan Pertama. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.

Tahir, Suaib, dkk. Maret 2016. *Islam Bukan ISIS*. Cetakan Kedua. PT. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Thomas, Scott M. 2005. *The Global Resurgence of Religion and The Transformation of Internasional Relation, The Struggle for The Soul of The Twenty-First Century*. Palgrave Macmillan.

*Waspada ISIS*. September 2015. Cetakan Pertama. PT. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Wahid, Abdul, dkk. 2004. *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Cetakan Kesatu. PT. Refika Aditama.

#### **Majalah/Jurnal/Skripsi**

Duski, Samad. 2014. *Radikalisme dan Antisipasi ISIS*. Tersedia di <http://tarbiyahainib.ac.id/dekan/artikel/588-radikalisme-dan-antisipasi-isis>. Diakses pada 21 Agustus 2015.

International Crisis Group. November 2007. *Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Asia Report N°142-19. Hal. 1.

*Membangun Sinergi Meningkatkan Kewaspadaan*. 2016. BNPT E-Magazine. Jalan Damai. Edisi April.

*Memperkuat Sinergi Negara dan Masyarakat*. 2016. BNPT E-Magazine. Jalan Damai. Edisi Maret.

Prihartono, Hari. 2007. *TNI dan Regulasi Keamanan Nasional*. Majalah Patriot. Edisi Khusus Tahun VIII.

Santoso, Djoko. Oktober 2007. *Keamanan Nasional Ditinjau dari Perspektif Tugas Tentara AD*. Majalah Patriot. Edisi Khusus Tahun VIII.

Tambunan, PM. Fernando. *Sejarah dan Ideologi ISIS*. Kajian Ketahanan Nasional, Khususnya Kajian Stratejik Intelijen. Program Pasca Sarjana. Universitas Indonesia. Jakarta. Tersedia di [http://www.academia.edu/10385019/sejarah\\_dan\\_ideologi\\_isis](http://www.academia.edu/10385019/sejarah_dan_ideologi_isis). Diakses pada 10 Agustus 2015.

#### ***Internet/Website***

Bima Islam Kemenag. *Sinergi Tanggulangi Terorisme, BNPT Taken MoU Dengan Kemenag*. Tersedia di <http://bimaislam.kemenag.go.id/post/berita/sinergi-tanggulangi-terorisme-bnpt-taken-mou-dengan-kemenag>. Diakses pada 03 September 2017.

Damailah Indonesiaku. *Deradikalisasi: Pembinaan Wawasan Keagamaan*. Tersedia di <https://damailahindonesiaku.com/deradikalisasi-pembinaan-wawasan-keagamaan.html>. Diakses pada 03 Oktober 2016.

Damailah Indonesiaku. *Deradikalisasi: Pembinaan Wawasan Kebangsaan*. Tersedia di <https://damailahindonesiaku.com/deradikalisasi-pembinaan-wawasan-kebangsaan.html>. Diakses pada 05 Oktober 2016.

Damailah Indonesiaku. *Deradikalisasi Pembinaan Kewirausahaan*. Tersedia di <https://damailahindonesiaku.com/deradikalisasi-pembinaan-kewirausahaan.html>. Diakses pada 05 Oktober 2016.

Damailah Indonesiaku. *RI-Spanyol Kerjasama Tanggulangi Terorisme*. Tersedia di <https://damailahindonesiaku.com/ri-spanyol-kerja-sama-tanggulangi-terorisme.html>. Diakses pada 03 Oktober 2016.

Indonesia Rbth. *Perangi ISIS, Rusia-Indonesia Sepakat Tingkatkan Kerjasama Kontra-Terrorisme*. Tersedia di [http://indonesia.rbth.com/news/2016/01/29/perangi-isis-rusia-indonesia-sepakat-tingkatkan-kerja-sama-kontraterorisme\\_563553](http://indonesia.rbth.com/news/2016/01/29/perangi-isis-rusia-indonesia-sepakat-tingkatkan-kerja-sama-kontraterorisme_563553). Diakses pada 04 Oktober 2016.

Komnas HAM. *Kerjasama Penanggulangan Terorisme Berbasis HAM*. Tersedia di <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/08/18/141/kerjasama-penanggulangan-terorisme-berbasis-ham>. Diakses pada 14 Januari 2017.

M. Republika. *ISIS, Khilafah dan Pancasila*. Tersedia di <http://www.m.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/08/07/n9x97p39-isis-khilafah-dan-pancasila>. Diakses pada 18 Mei 2017.

M. Tempo. *Pelaku Bom Gereja Samarinda Diduga Berafiliasi dengan ISIS*. Tersedia di <https://m.tempo.co/read/fokus/2016/11/14/3385/pelaku-bom-gereja-samarinda-diduga-berafiliasi-dengan-isis>. Diakses pada 20 Februari 2017.

M. Tempo. *Sel ISIS di Balik Penusukan Polisi*. Tersedia di <https://m.tempo.co/read/fokus/2016/10/21/3377/sel-isis-di-balik-penusukan-polisi>. Diakses pada 20 Februari 2017.

Mega Politan Kompas. *Kaleidoskop 2016: Kilas Balik Bom Thamrin*. Tersedia di <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/16/07000081/kaleidoskop.2016.kilas.balik.bom.thamrin?page=all>. Diakses pada 19 Februari 2017.

Nasional Kompas. *Hadang terorisme Global Indonesia Jalin Kerjasama Dengan Italia*. Tersedia di <http://nasional.kompas/read/2016/06/22/16282201/hadang.terorisme.global.indonesia.jalin.kerja.sama.dengan.italia>. Diakses pada 23 Oktober 2016.

NTMC Polri. *Polri dan BNPT Perkuat Kerjasama Penanggulangan Ancaman Terorisme*. Tersedia di <http://ntmcpolri.info/home/polri-dan-bnpt-perkuat-kerjasama-penanggulangan-ancaman-terorisme/>. Diakses pada 16 Januari 2017.

Risalah Mujahidin. *Risalah Mujahidin Edisi 35: ISIS Mujahid atau Teroris*. Tersedia di [www.risalahmujahidin.com/risalah-mujahidin-edisi-35-isis-mujahid-atau-teroris/](http://www.risalahmujahidin.com/risalah-mujahidin-edisi-35-isis-mujahid-atau-teroris/). Diakses pada 06 Mei 2017.

#### ***Lain-lain***

Ismail, Chairuddin. *Naskah Diskusi Publik. Paham Radikal dan Transisi Demokrasi Serta Keutuhan NKRI*. Jakarta. April 2015.

*Nota Kesepahaman Antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia dan Dewan Anti-Terrorisme Republik Filipina Tentang Kerjasama Memerangi Terorisme Internasional.*